



LAPORAN KINERJA
TAHUN 2022
DIREKTORAT
KEPELABUHANAN PERIKANAN

**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TA. 2022**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya hingga Laporan Kinerja Tahun 2022 TA. 2022 Satker Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap dapat diselesaikan. Sebagai salah satu unit eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sejak Tahun 2013 telah memanfaatkan *Balanced Score Card* (BSC) sebagai suatu alat dalam proses manajemen strategik yang diawali dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Dengan *Balanced Scorecard*, seluruh unit organisasi kini memiliki kaitan yang erat baik secara vertikal maupun horizontal yang bermuara kepada satu titik pencapaian visi dan misi KKP. *Balanced Scorecard* menjadi instrumen yang tepat bagi sebuah organisasi dan individu-individu yang ada di dalamnya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Dengan mengacu pada RPJMN 2021 – 2024 dan RKP tahun 2022, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan senantiasa mengupayakan seluruh rencana aksi yang ada dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien, sebagaimana mestinya dengan harapan target indikator kinerja yang terdapat pada RPJMN dan RKP dapat tercapai dengan maksimal dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode satu tahun. Pencapaian pada Tahun 2021 merupakan pencapaian yang dijadikan dasar (*baseline*) untuk menetapkan target pada tahun-tahun berikutnya yang kemungkinan besar akan berdampak pada reviu beberapa dokumen perencanaan di Tahun 2022.

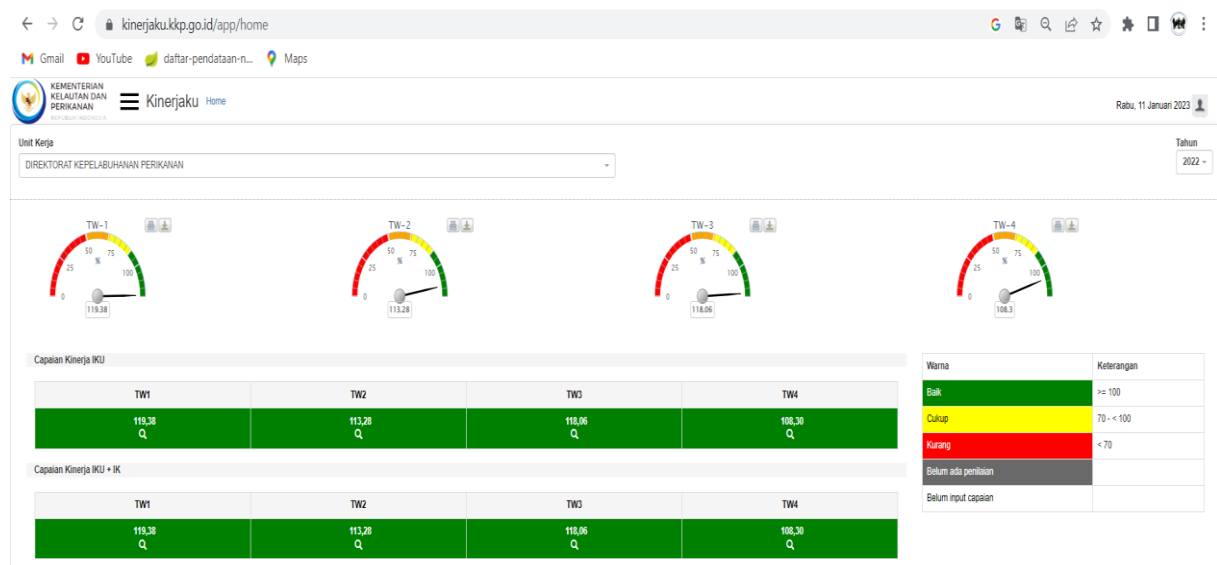
Semoga apa yang disajikan dalam Laporan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, 11 Januari 2023
Direktur Kepelabuhanan Perikanan

Tri Aris Wibowo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-032.03.1.238720/2022 Revisi ke 11 tanggal 23 Desember 2022. Alokasi anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun 2022 sebesar Rp.48.334.183.000. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2022 ini adalah sebesar Rp.47.755.112.527 atau telah mencapai 98,80%. Capaian kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada Tahun 2022 sudah baik, hal ini ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU sebesar 108,30% dan Nilai capaian Kinerja IKU dan IKK sebesar 108,30%. sebagaimana dashboard dibawah ini:



Direktorat Kepelabuhanan Perikanan terdapat 10 (sepuluh) Indikator Kinerja pada akhir tahun 2022 dilakukan perhitungan 10 (sepuluh) indikator kinerja sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		WAKTU PENGUKURAN	TARGET
1	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal	1	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	Triwulan	5
2	Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing	2	Tingkat operasional pelabuhan perikanan (persen)	Triwulan	77,5
3	Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal	3	Persentase pemenuhan prasarana pemungutan PNBP pasca produksi (persen)	Tahunan	100
4	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan	4	Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan KP (orang)	Tahunan	225.531
5	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	5	IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	Semesteran	79
		6	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (nilai)	Tahunan	92

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	WAKTU PENGUKURAN	TARGET
	7	Persentase Unit Kerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	Triwulan	86
	8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kelabuhanan Perikanan (persen)	Triwulan	70
	9	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis (persen)	Tahunan	75
	10	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kelabuhanan Perikanan (persen)	Semesteran	95

Guna meningkatkan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab IKU dan Tim Pengelola Kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan agar melakukan evaluasi pencapaian yang telah dicapai serta melakukan pemantauan serta pengawalan untuk pencapaian kinerja triwulanan yang akan datang. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai lingkup Direktorat Kelabuhanan Perikanan diharapkan dapat mendukung kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan yang lebih baik lagi pada tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.3 TUGAS DAN FUNGSI	2
1.4 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	3
1.5 PERMASALAHAN UTAMA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN	4
1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN	5
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024	6
2.2 PERJANJIAN KINERJA	7
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	8
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	8
3.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA	10
3.2.1 <i>Sasaran Kegiatan (SK-1): Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang Optimal</i>	10
3.2.2 <i>Sasaran Kegiatan (SK-2): Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Berdaya Saing</i>	12
3.2.3 <i>Sasaran Kegiatan (SK-3): Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal</i>	19
3.2.4 <i>Sasaran Kegiatan (SK-4): Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan</i>	21
3.2.5 <i>Sasaran Kegiatan (SK-5): Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan</i>	22
BAB 4 PENUTUP	35

DAFTAR TABEL

1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2022	6
2	Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2022	9
3	Capaian IKU "Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya" sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022	10
4	Perbandingan Capaian IKU "Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya"	11
5	Bentuk Kegiatan pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya pada Tahun 2022	11
6	Capaian IKU "Tingkat operasional pelabuhan perikanan" sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022	18
7	Perbandingan Capaian IKU "Tingkat operasional pelabuhan perikanan" sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022	18
8	Perhitungan Persentase Operasional Pelabuhan Perikanan Triwulan IV Tahun 2022	18
9	Capaian IKU "Persentase Pemenuhan Prasarana Pemungutan PNPB Pasca Produksi" sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022	20
10	Perbandingan Capaian IKU "Persentase Pemenuhan Prasarana Pemungutan PNPB Pasca Produksi (persen)" sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022	20
11	Capaian IKU "Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan KP (orang)" sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022	21
12	Perbandingan Capaian IKU "Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan KP (orang)" sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022	22
13	Capaian IKU "IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)" sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022	23
14	Perbandingan Capaian IKU "IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)" sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022	23
15	Capaian IKU "Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (nilai)" sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022	26
16	Perbandingan Capaian IKU "Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (nilai)" sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022	26
17	Capaian IKU "Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar" sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022	27
18	Perbandingan Capaian IKU "Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar" sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022	27
19	Capaian IKU "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan" sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022	29
20	Perbandingan Capaian IKU "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan" sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022	29
21	Kegiatan Prioritas/Strategis Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Pada 2022	30
22	Capaian IKU "Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis (persen)" sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022	32

23	Perbandingan Capaian IKU “Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis (persen)” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022	32
24	Revisi Anggaran (Blokir <i>Automatic Adjustment</i>) AA sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022	33
25	Alokasi dan Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2022	33
26	Capaian IKU “Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022	33
27	Perbandingan Capaian IKU “Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis (persen)” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022	34

DAFTAR GAMBAR

1	Stuktur Organisasi Direktorat Kelabuhanan Perikanan Tahun 2022	3
2	Perjanjian Kinerja Direktur Kelabuhanan Perikanan Tahun 2022	7
3	Dashboard Aplikasi Kinerjaku Dit. Kelabuhanan Perikanan Tahun 2022	8
4	Diagram Tenaga Kerja yang Terlibat Pengelolaan Kelabuhanan Perikanan Triwulan Tahun 2022	21
5	Dashboard Aplikasi IP ASN Dit. Kelabuhanan Perikanan sampai dengan bulan September 2022	23
6	Lembar Kerja Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan	26
7	Aplikasi Bitrix (Kunjungan Kerja ke Jepang)	28

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Implementasi pengembangan infrastruktur berdasarkan bisnis proses usaha perikanan tangkap menjadi kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi; dengan mengedepankan *outcome* berupa efisiensi pengelolaan dan nilai tambah hasil tangkapan ikan. Sinergi pengembangan infrastruktur diarahkan bukan hanya bersifat antar sektor, melainkan juga antar wilayah, serta diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui intensifikasi teknologi informasi dengan basis data yang lebih akurat. Secara umum arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong sistem infrastruktur pelabuhan perikanan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bermutu dan berdaya saing; termasuk integrasinya dengan sektor terkait, seperti industri, jasa, dan perhubungan/transportasi.

Ketersediaan pelabuhan perikanan di sentra-sentra usaha perikanan tangkap sangat vital untuk mendukung kelancaran usaha penangkapan ikan dan usaha pendukungnya. Pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan untuk meningkatkan operasional pelabuhan perikanan sesuai peran dan fungsinya sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan maupun di dalam Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel serta penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang sesuai dengan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi tolok ukur penilaian kinerja suatu Instansi Pemerintah. Dalam rangka mendukung terciptanya tujuan dimaksud, maka Instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus menyusun Laporan Kinerja. Dasar dari penyusunan laporan kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 68/Permen-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2022 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan selama Tahun 2022. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan pelabuhan perikanan ke depan.

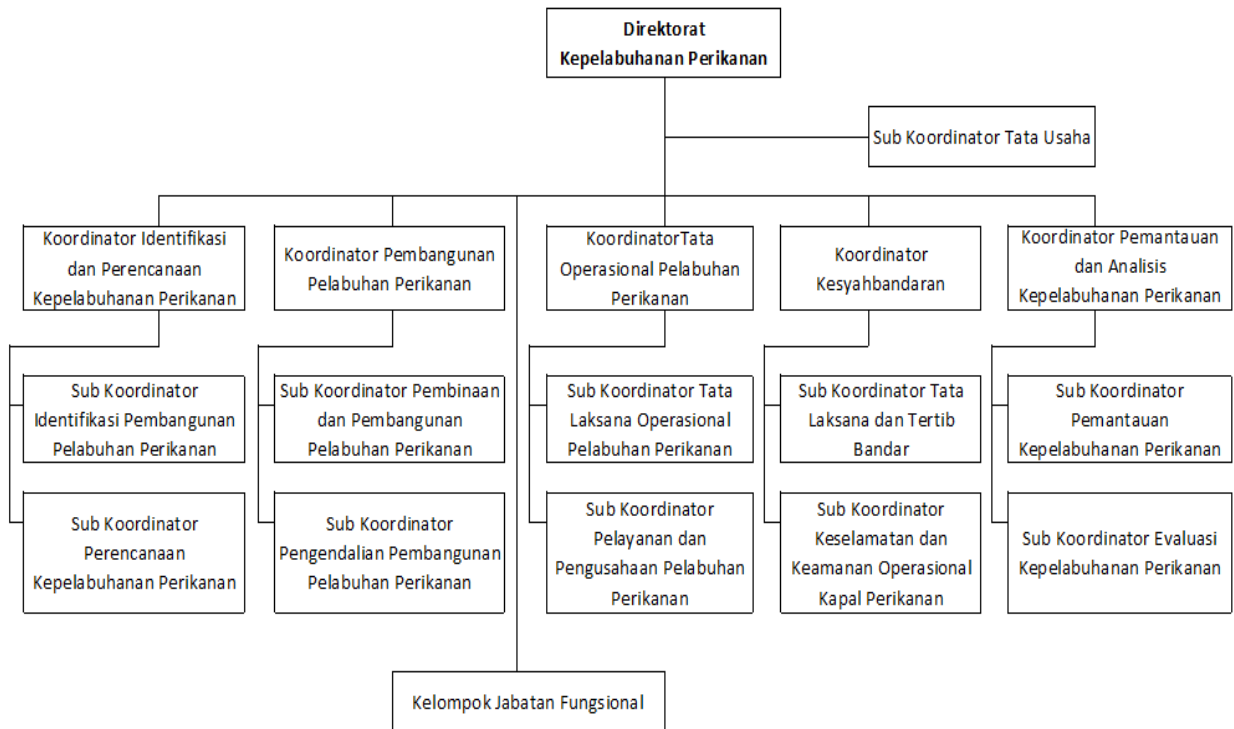
1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan BAB V Bagian Keenam Pasal 67, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan berada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Adapun tugas Direktorat Kepelabuhanan Perikanan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan.

Sedangkan sesuai pasal 68, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan;
5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Susunan organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2022 (sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 9 Tahun 2022, Tanggal 29 Maret 2022)

1.4 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Sasaran strategis pembangunan perikanan tangkap berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut :

1. Sasaran kegiatan pertama (SK-1) yang akan dicapai adalah **“Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal”** dengan indikator kinerja: Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya.
2. Sasaran kegiatan kedua (SK-2) yang akan dicapai adalah **“Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing”**, dengan indikator kinerja: Tingkat operasional pelabuhan perikanan.
3. Sasaran kegiatan ketiga (SK-3) yang akan dicapai adalah **“Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal”**, dengan indikator kinerja: Persentase pemenuhan prasarana pemungutan PNBP pasca produksi.

4. Sasaran kegiatan keempat (SK-4) yang akan dicapai adalah "**Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan**", dengan indikator kinerja: Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan KP.
5. Sasaran kegiatan keempat (SK-5) yang akan dicapai adalah "**Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan**", dengan indikator kinerja:
 - a. IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan;
 - b. Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan;
 - c. Persentase unit Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar;
 - d. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan;
 - e. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis, dan;
 - f. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

1.5 PERMASALAHAN UTAMA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN

Pelabuhan perikanan dalam pengelolaannya tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi dan sosial, tetapi aspek ekologi juga penting di perhatikan dalam pengelolaan pelabuhan perikanan. Perpaduan aspek ekologi, ekonomi dan sosial merupakan suatu model pendekatan pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan yang riil demi keberlanjutan pembangunannya. Pengelolaan pelabuhan yang melakukan pemeliharaan integritas ekologi atau pemeliharaan lingkungan, maka dari itu untuk tercapainya pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan itu, perlu penerapan manajemen pelabuhan yang pro lingkungan.

Pengelolaan pelabuhan, merupakan persoalan yang rumit dan membutuhkan pengaturan yang teknis dan mendetail. Kompleksnya persoalan dan besarnya potensi pelabuhan di Indonesia tidak disertai dengan pengaturan yang sistematis. Kurangnya pengaturan di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan, dewasa ini terasa sangat mengganggu dalam pengembangan potensi maritim yang dimiliki Indonesia.

Persoalan lain yang terkait dengan pengelolaan pelabuhan perikanan adalah adanya kecenderungan Pemerintah Daerah untuk mengelola Pelabuhan Perikanan, tanpa memperhatikan kemampuan dan ketersediaan fasilitas. Disinyalir, kecenderungan ini salah satunya diakibatkan oleh keinginan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar-besarnya.

Permasalahan-permasalahan pokok Pengelolaan Pelabuhan Perikanan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi operasionalisasi Rencana induk pelabuhan perikanan nasional (RIPPN) pengaturan ruang pelabuhan perikanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan perikanan, rencana lokasi pelabuhan perikanan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan pelabuhan perikanan);
- b. Masih kurangnya Syahbandar dan Petugas Syahbandar yang ditempatkan di Pelabuhan Perikanan;
- c. Masih sedikitnya jumlah pelabuhan perikanan yang tergabung Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), terutama Pelabuhan Perikanan yang ada syahbandarnya;
- d. Masih terdapatnya operator PIPP yang dialih tugaskan ke Unit Kerja yang lain;

- e. Masih rendahnya kepatuhan dalam menyampaikan hasil tangkapan ikan yang akurat, obyektif dan tepat waktu dalam aplikasi PIPP;
- f. Belum optimalnya sinergi pengelolaan Pelabuhan Perikanan antara pusat dan daerah, antar daerah, serta dengan sektor terkait.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun 2022 disusun bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang capaian kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan selama bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi yang transparan. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun 2022 sebagai berikut:

A. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.

B. Bab 1 Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

C. Bab 2 Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

D. Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

E. Bab 4 Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

BAB 2. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 disusun berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai berikut:

1. Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Visi DJPT tahun 2020-2024 adalah “terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat Mandiri, dan Berkepribadiann Berlandaskan Gotong-Royong”;
2. Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
DJPT melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan tangkap;
 - b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, melalui peningkatan kontribusi ekonomi subsektor perikanan tangkap;
 - c. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap; dan
 - d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup DJPT.

Sasaran Strategis Pembangunan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		WAKTU PENGUKURAN	TARGET
1	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal	1	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	Triwulan	5
2	Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing	2	Tingkat operasional pelabuhan perikanan (persen)	Triwulan	77,5
3	Pemenuhan prasarana pemungutan PNPB perikanan tangkap yang optimal	3	Persentase pemenuhan prasarana pemungutan PNPB pasca produksi (persen)	Tahunan	100
4	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan	4	Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan KP (orang)	Tahunan	225.531
5	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	5	IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	Semesteran	79
		6	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (nilai)	Tahunan	92
		7	Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	Triwulan	86

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	WAKTU PENGUKURAN	TARGET
	8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kelabuhanan Perikanan (persen)	Triwulan	70
	9	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis (persen)	Tahunan	75
	10	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kelabuhanan Perikanan (persen)	Semesteran	95

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan Tahun 2022

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Penetapan Kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan Perjanjian Kinerja sampai dengan bulan Desember tahun 2022, terdapat perubahan Anggaran pada Perjanjian Kinerja pada bulan Agustus 2022 secara rinci sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tri Aris Wibowo**

Jabatan : Direktur Kelabuhanan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Muhammad Zaini**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Agustus 2022

Pihak Kedua
Direktur Kelabuhanan Perikanan

Muhammad Zaini

Pihak Pertama
Direktur Kelabuhanan Perikanan

Tri Aris Wibowo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal	1 Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	5
2 Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing	2 Tingkat operasional pelabuhan perikanan (persen)	77,5
3 Pemenuhan prasarana pemungutan PNB perikanan tangkap yang optimal	3 Persentase pemenuhan prasarana pemungutan PNB pasca produksi (persen)	100
4 Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kelabuhanan Perikanan	4 Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan KP (orang)	225.531
5 Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kelabuhanan Perikanan	5 IP ASN Direktorat Kelabuhanan Perikanan (indeks)	79
	6 Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan (nilai)	92
	7 Persentase Unit Kerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	86
	8 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kelabuhanan Perikanan (persen)	70
	9 Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis (persen)	75
	10 Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kelabuhanan Perikanan (persen)	95

Kegiatan : **Pengelolaan Pelabuhan Perikanan**
Jumlah Anggaran Tahun 2022 : **Rp. 65.755.541.000,-**

Jakarta, 8 Agustus 2022

Pihak Kedua
Direktur Kelabuhanan Perikanan

Muhammad Zaini

Pihak Pertama
Direktur Kelabuhanan Perikanan

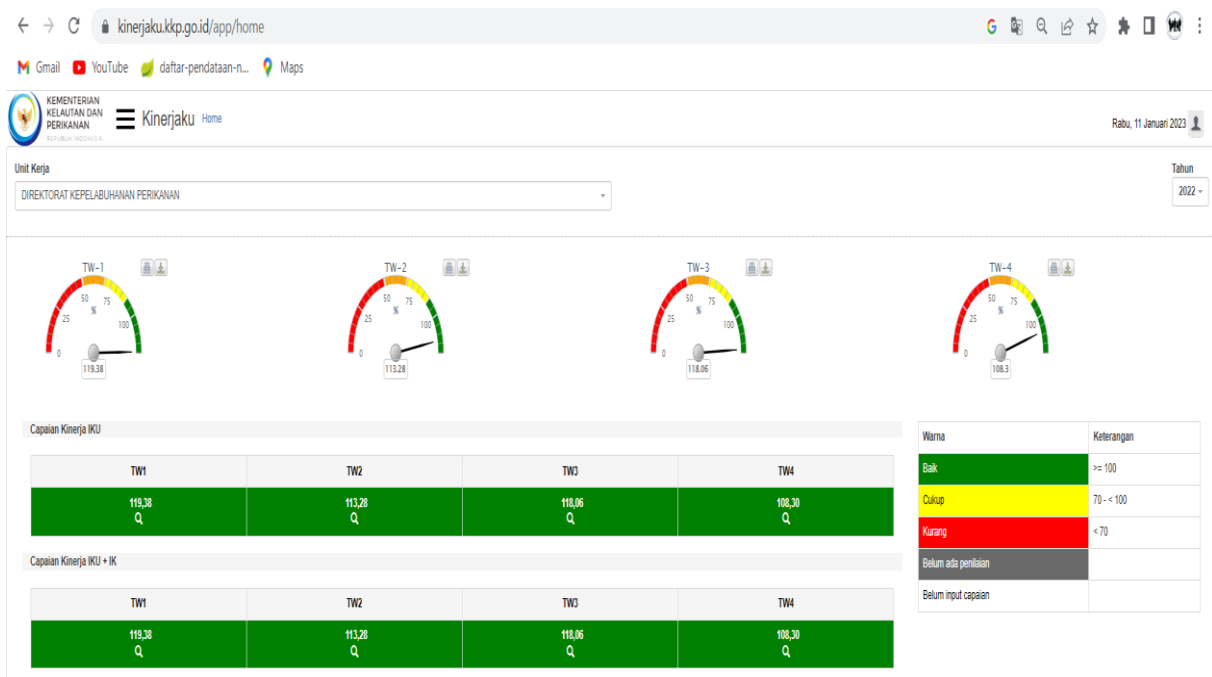
Tri Aris Wibowo

Gambar 2. Perjanjian Kinerja Direktur Kelabuhanan Perikanan Tahun 2022

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan pada tahun 2022 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Kepelabuhanan Perikanan menitikberatkan pada 5 (lima) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dan 5 (lima) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Tangkap. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II.



Gambar 3. Dashboard Aplikasi Kinerjaku Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2022

Capaian Kinerja IKU merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. Capaian kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada Tahun 2022 masih dikategori baik, hal ini ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU dan IKK sebesar 108,30%.

Capaian Kinerja IKU Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2022 ini masih belum maksimal, dikarenakan adanya beberapa indikator kinerja baru yang pengukuran pencapaiannya masih dalam tahap formulasi perhitungan. Namun secara umum indikator kinerja lainnya menunjukkan pencapaian yang semakin baik pada masing-masing sasaran kegiatan. Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada Tahun 2022 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2022

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	WAKTU PENGUKURAN	TARGET	CAPAIAN	
					TW IV	% thdp Target TW IV
1	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan perikanan yang optimal	1 Persentase Pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	Triwulan	5	5,26	105,20
2	Pengelolaan Pelabuhan perikanan yang berdaya saing	2 Tingkat operasional Pelabuhan perikanan (persen)	Triwulan	77,50	102,72	102,72
3	Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal	3 Persentase pemenuhan prasarana pemungutan PNBP pasca produksi (persen)	Tahunan	100	100	100
4	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan	4 Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan KP (orang)	Tahunan	225.531	311.200	137,99
5	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	5 IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	Semesteran	79	79,3	100,38
		6 Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (nilai)	Tahunan	92	99,23	107,86
		7 Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	Triwulan	86	100	116,28
		8 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)	Triwulan	70	100	142,86
		9 Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis (persen)	Tahunan	75	100	133,33
		10 Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)	Semesteran	95	98,80	104,00

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Kegiatan dan indikator kinerja sebagai berikut :

3.2.1 Sasaran Kegiatan (SK-1) : Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan yang Optimal

Sasaran Kegiatan Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan merupakan tujuan dari program Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, sasaran ini memiliki Indikator Kinerja, yaitu :

Persentase Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya

Indikator ini menunjukkan persentase pembinaan pengembangan pelabuhan perikanan guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi Pelabuhan Perikanan. Adapun metode perhitungan yang dilakukan adalah dengan melakukan perhitungan jumlah lokasi capaian pengembangan di Pelabuhan Perikanan berupa salah satu kegiatan:

1. Identifikasi rencana pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan, dan/atau
2. Kegiatan penyiapan dokumen perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan, dan/atau
3. Pembahasan dan koordinasi perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan
4. Kegiatan pembinaan pengembangan pelabuhan perikanan
5. Kegiatan pengendalian pembangunan pelabuhan perikanan

Identifikasi fasilitas pelabuhan perikanan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 41/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Umum Perhitungan Penggunaan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan untuk mengidentifikasi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Dari hasil identifikasi dan analisa data, terdapat beberapa fasilitas yang sudah sesuai dengan kelas masing-masing pelabuhan. Namun ada beberapa fasilitas yang belum sesuai dan perlu adanya pengembangan atau bahkan pembangunan baru (untuk fasilitas yang belum tersedia).

Pengukuran indikator ini dilakukan setiap 3 (tiga) bulan atau triwulanan dan target indikator ini adalah 5 (lima) persen pada tahun 2022. Pada Triwulan III ini telah dilakukan perhitungan capaian dengan realisasi mencapai 5,26% telah mencapai target perhitungan. Sehingga pada Triwulan IV tidak dilakukan perhitungan kembali. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan baru pada tahap identifikasi Pelabuhan perikanan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan sebanyak 30 lokasi Pelabuhan Perikanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dan Daerah.

Tabel 3. Capaian IKU “Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Nama IKU	Target Tahun 2022	TW I	TW II	TW III	TW IV	% Capaian Target
Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya	5	3,51	4,74	5,26	5,26	105,20

Tabel 4. Perbandingan Capaian IKU “Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya”

SS 1 Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal												
IKU 1 Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)												
Realisasi 2017-2021					Realisasi 2022					Renstra DJPT		
2017	2018	2019	2020	2021	Target Tahun 2022	Target TW IV 2022	Realisasi 2022	% Realisasi thd Target 2022	% Realisasi thd Target 2022	Target Renstra 2022	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
-	-	27	26	28	5	3	5,26	105,20	105,20	33	-	

Pada tabel atas terdapat perbandingan IKU 1 persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen). Pada tahun 2021 IKU 1 ini Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan terdapat 3 kegiatan pengembangan Pelabuhan Perikanan sampai dengan triwulan IV Tahun 2021, namun pada tahun 2022 terjadi perbedaan cara perhitungan yakni dengan persentase pada triwulan IV terdapat telah mencapai target sebesar 5,26%, pada triwulan IV ini telah terdapat 30 lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dilakukan kegiatan pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya pada Triwulan IV Tahun 2022.

Tabel 5. Bentuk Kegiatan pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya yang telah tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022

No	Lokasi	Jenis Kegiatan
1	PPS Belawan	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Appraisal Mission Proyek Eco Fishing Port)
2	PPS Bitung	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Appraisal Mission Proyek Eco Fishing Port)
3	PPS Kendari	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Appraisal Mission Proyek Eco Fishing Port)
4	PPS Cilacap	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Appraisal Mission Proyek Eco Fishing Port)
5	PPN Kejawanan	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan Integrated of Fishing Port and International Fish Markets Phase-I (IFP-IFM Phase I)
6	PP Biak	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Integrated of Fishing Port and International Fish Market (IFP-IFM))
7	PP Likupang	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan Integrated of Fishing Port and International Fish Markets Phase-I (IFP-IFM Phase I)
8	PP Bagansiapiapi	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan Integrated of Fishing Port and International Fish Markets Phase-I (IFP-IFM Phase I)
9	PPN Brondong	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan
10	PPN Merauke	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Integrated of Fishing Port and International Fish Market Phase-I (IFP-IFM Phase I)
11	PP Mansapa	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan Integrated of Fishing Port and International Fish Market Phase II
12	PPN Pengambang	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan Integrated of Fishing Port and International Fish Markets Phase-I (IFP-IFM Phase I)
13	PPN Pekalongan	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Integrated of Fishing Port and International Fish Market (IFP-IFM))
14	PP Selat Lampa	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan <i>Integrated of Fishing Port and International Fish Market Phase II</i>

No	Lokasi	Jenis Kegiatan
15	PP Kuala Langsa	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan (WKOPP dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
16	PP Le Meulee	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan (WKOPP dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
17	PPI Morodemak	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan (WKOPP)
18	PP Lekok	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan
19	PPN Sibolga	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan (WKOPP)
20	PP Banjarmasin	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan (WKOPP)
21	Kutai Kartanegara	Survei Lapangan untuk alternatif lokasi Pelabuhan Perikanan di Ibu Kota Nusantara
22	PPP Morodemak	Koordinasi Awal Penyusunan dan Penetapan WKOPP
23	PP Teluk Awang	Penyusunan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP)
24	PPN Kwandang	Penyusunan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP)
25	PPP Tamperan	Rancangan Keputusan Menteri tentang WKOPP
26	PP Larangan	Evaluasi Penetapan WKOPP
27	PPP Bajomulyo	Pembahasan Usulan Penetapan WKOPP
28	PPP Tegalsari	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan <i>Integrated Fishing Ports and International Fish Markets (IFP-IFM) Phase-I</i>
29	PP Untia	Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Untia. (Jalan dan Jembatan, Irigasi)
30	PP Teluk awang	Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Teluk Awang.

3.2.2 Sasaran Kegiatan (SK-2): Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Berdaya Saing

Persentase Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan

Persentase Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan merupakan indikator yang menunjukkan persentase pencapaian pembinaan operasional pelabuhan perikanan. Pengukuran indikator ini dilakukan setiap 3 (tiga) bulan atau triwulanan dan target indikator ini adalah 77,5% pada tahun 2022. Pada akhir tahun 2022 ini sudah dilakukan perhitungan capaian dengan realisasi triwulan IV mencapai 79,61%.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian IKU ini sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, antara lain:

1. Pelaksanaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan :
 - b. Telah diterapkannya TemanSPB di 60 lokasi Pelabuhan Perikanan;
 - c. Asistensi TemanSPB di 2 lokasi yaitu PP Kuala Langsa dan PP Pusong;
 - d. Penerbitan Persetujuan Berlayar melalui aplikasi TEMANSPB Bulan Januari - Desember 2022 sebanyak 90.009 lembar;

- e. Penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan melalui aplikasi TEMANSPB Bulan Januari - Desember 2022 sebanyak 98.968 lembar;
 - f. Surat Undangan Nomor: B.1881/DJPT.4/TU.330/XI/2022 tanggal 23 November 2022 Perihal Kegiatan Diseminasi Kesyahbandaran kepatuhan kapal perikanan dan penerapan penerbitan persetujuan berlayar online melalui aplikasi TemanSPB di Pelabuhan Perikanan;
 - g. Surat Undangan Nomor: B.2038/DJPT.4/TU.330/XII/2022 tanggal 25 Desember 2022 Perihal Pelaksanaan Kesyahbandaran Penerapan Aplikasi TemanSPB;
2. Penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)
- a. Telah Terbit 782 Sertifikat CPIB Periode Januari-Desember 2022;
 - b. Total petugas mutu yang tersebar di masing-masing Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan UPT Daerah sebanyak 276 personil;
 - c. Menghadiri Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian KP Dalam Rangka Bimbingan Teknis CPIB di Kapuas Hulu - Kalimantan barat Oktober 2022;
 - d. Pembahasan Evaluasi data kapal perikanan yang mensuplai bahan baku untuk diekspor ke Uni Eropa di Pelabuhan Perikanan UPT Daerah tanggal 6 Oktober 2022;
 - e. Menghadiri Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian KP Dalam Rangka Bimbingan Teknis CPIB di Aceh Utara - Aceh 21 Oktober 2022;
 - f. Rapat Pembahasan Evaluasi Data Kapal Perikanan yang Mensuplai Bahan Baku untuk Diekspor ke Uni Eropa tanggal 8 November 2022;
 - g. Menghadiri Rapat Sinkronisasi Bisnis Proses Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tanggal 11 November 2022;
 - h. Menghadiri Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian KP Dalam Rangka Bimbingan Teknis CPIB di Kebumen - Jawa Tengah 14 November 2022;
 - i. Menghadiri Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian KP Dalam Rangka Bimbingan Teknis CPIB di Kota Kupang - NTT 14 November 2022;
 - j. Rapat Pembahasan Evaluasi Lanjutan Data Kapal Perikanan yang Mensuplai Bahan Baku untuk Diekspor ke Uni Eropa tanggal 17 November 2022;
 - k. Menghadiri Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian KP Dalam Rangka Bimbingan Teknis CPIB di NTT 18 November 2022;
 - l. Menghadiri Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian KP Dalam Rangka Bimbingan Teknis CPIB di Blitar - Jawa Timur 23 November 2022;
 - m. Menghadiri Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian KP Dalam Rangka Bimbingan Teknis CPIB di Merauke - Papua 23 November 2022;
 - n. Rapat Pembahasan Evaluasi Lanjutan Data Kapal Perikanan yang Mensuplai Bahan Baku untuk Diekspor ke Uni Eropa tanggal 28 November 2022;
 - o. Menghadiri Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit DG SANTE Uni Eropa Tahun 2020 tanggal 8 Desember 2022.
3. Persetujuan Prinsip Pelabuhan Perikanan
- a. Penerbitan persetujuan prinsip sebanyak 136 surat periode Januari sampai dengan 30 Desember 2022;
 - b. Surat Nomor: B.1699/DJPT.4/PL.210/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Perpanjangan dan Perubahan Luas Bangunan oleh Sdr. Willy Santoso dengan jangka waktu 2 tahun di PPS Cilacap;

- c. Surat Nomor: B.1698/DJPT.4/PL.210/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Perpanjangan dan Perubahan Jenis Usaha oleh Sdr. Tri Sunamto dengan jangka waktu 2 tahun di PPS Cilacap;
- d. Surat Nomor: B.1697/DJPT.4/PL.210/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Perpanjangan Penggunaan Tanah seluas 300 m² oleh Sdr. Sugiman dengan jangka waktu 2 tahun di PPS Cilacap;
- e. Surat Nomor: B.1696/DJPT.4/PL.210/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Perpanjangan Penggunaan Tanah seluas 1065 m² oleh PT. Jinghu Berkas Samudera dengan jangka waktu 3 tahun di PPS Cilacap;
- f. Surat Nomor: B.1695/DJPT.4/PL.210/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Perpanjangan Penggunaan Tanah seluas 450 m² oleh Sdr. Lesmin dengan jangka waktu 2 tahun di PPS Cilacap;
- g. Surat Nomor: B.1961/DJPT.4/PL.210/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 perihal persetujuan pembatalan perjanjian pemanfaatan tanah di PPS Bitung;
- h. Surat Nomor: B.1960/DJPT.4/PL.210/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 perihal Persetujuan pembataln perjanjian penggunaan tanah di PPS Bitung;
- i. Surat Nomor: B.1558/DJPT.4/PL.210/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Penggunaan Tanah seluas 1000 m² oleh Sdr. Hendri dengan jangka waktu perjanjian selama 2 tahun di PPN Kejawan;
- j. Surat Nomor: B.1692/DJPT.4/PL.210/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Penggunaan Tanah seluas 5353 m² oleh PT. Cahaya Bahari Abadi dengan jangka waktu perpanjangan perjanjian selama 2 tahun di PPN Kejawan;
- k. Surat Nomor: B.1691/DJPT.4/PL.210/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Penggunaan Tanah oleh Sdr. Fitri Puspitasari dkk dengan jangka waktu perjanjian selama 1 tahun di PPN Kejawan;
- l. Surat Nomor: 1965/DJPT.4/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 perihal Persetujuan Prinsip Perubahan Perjanjian oleh PT. Jaya Semangat Wirabahari di PPN Kejawan;
- m. Surat Nomor: B.1962/DJPT.4/PL.210/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 perihal persetujuan prinsip penggunaan bangunan permanen dengan luas terlampir selama 1 tahun di PPN Pemangkat;
- n. Surat Nomor: 1694/DJPT.4/PL.210/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Penggunaan Tanah selus 1050 m² oleh PT. Mina Kelola Samudra dengan jangka waktu penggunaan tana selama 3 tahun di PPN Ternate;
- o. Surat Nomor: 1693/DJPT.4/PL.210/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Penggunaan Tanah selus 300 m² oleh PT. Fishindo Lintas Samudera dengan jangka waktu penggunaan tanah selama 3 tahun di PPN Ternate;
- p. Surat Nomor: 1701/DJPT.4/PL.210/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Penggunaan Tanah selus 138 m² oleh Sdr. Hi Agus Salim dengan jangka waktu perpanjangan penggunaan tanah selama 1 tahun di PPN Ternate;
- q. Surat Nomor: B.1854/DJPT.4/PL.210/XI/2022 tanggal 18 November 2022 perihal Persetujuan Pinsip penggunaan tanah seluas 800 m² oleh Koperasi Perikanan Santo Alvin Pratama selama 2 tahun di PPN Ternate;

- r. Surat Nomor: B.1689/DJPT.4/PL.210/X/2022 tanggal 20 Oktober perihal Persetujuan prinsip penggunaan tanah seluas 300 m² oleh CV. Maluku Fortuna dengan jangka waktu perpanjangan perjanjian selama 2 tahun di PPN Ambon;
- s. Surat Nomor: B.1687/DJPT.4/PL.210/X/2022 tanggal 20 Oktober perihal Persetujuan prinsip penggunaan tanah seluas 495 m² oleh CV. Adfani Bintang dengan jangka waktu perpanjangan perjanjian selama 2 tahun di PPN Ambon;
- t. Surat Nomor: B.1967/DJPT.4/PL.210/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 perihal Persetujuan Prinsip Perpanjangan Penggunaan Tanah seluas 800² m selama 3 tahun oleh PT. Mina Usaha Harapan di PPN Ambon;
- u. Surat Nomor: B.1966/DJPT.4/PL.210/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 perihal perpanjangan penggunaan tanah seluas 400 m selama 2 tahun oleh CV. Arbil di PPN Ambon;
- v. Surat Nomor: B.1690/DJPT.4/PL.210/X/2022 tanggal 20 Oktober perihal Persetujuan prinsip penggunaan tanah seluas 120 m² oleh KUD Minatani dengan jangka waktu perpanjangan perjanjian selama 1 tahun di PPN Brondong;
- w. Surat Nomor: B.1688/DJPT.4/PL.210/X/2022 tanggal 20 Oktober perihal Persetujuan prinsip penggunaan tanah seluas 16 m² oleh KUD Minatani dengan jangka waktu perjanjian selama 1 tahun di PPN Brondong;
- x. Surat Nomor: B.1963/DJPT.4/PL.210/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 perihal persetujuan prinsip penggunaan tanah seluas 50 m selama 1 tahun oleh Sdr. Arifin di PPN Brondong;
- y. Surat Nomor: B.1958/DJPT.4/PL.210/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 perihal persetujuan prinsip penggunaan tanah seluas 20 m dan bangunan permanen 30 m oleh Sdr. Mudiono di PPN Brondong;
- z. Surat Nomor: B.1959/DJPT.4/PL.210/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 perihal Persetujuan Prinsip perpanjangan penggunaan tanah seluas 1500 m oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Di PPN Brondong;
- aa. Surat Nomor: B.2014/DJPT.4/PL.210/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal persetujuan prinsip penggunaan tanah seluas 20 m dan bangunan permanen 30 m oleh Sdr. Mudhofir Widodo di PPB Brondong;
- bb. Surat Nomor: B.2013/DJPT.4/PL.210/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal persetujuan prinsip penggunaan bangunan permanen seluas 54 m oleh Koperasi Nelayan Taruna Selatan di PP SKPT Morotai;
- cc. Surat Nomor: B.1964/DJPT.4/PL.210/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 perihal persetujuan prinsip penggunaan tanah seluas 720 m dan bangunan permanen seluas 118 m oleh PT. Asta Buana Energi Perkasa di PPN Pengambengan;
- dd. Surat Nomor: B.1538/DJPT.4/PL.210/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 perihal Tanggapan Permohonan Penggunaan Tanah an. PT. Lautan Makmur Sentosa di PPN Sungailiat;
- ee. Surat Nomor: 1560/DJPT.4/PL.210/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 perihal Tanggapan Atas Permohonan Penggunaan BMN an CV. Baura di PP Teluk Awang;
- ff. Surat Nomor: B.1564/DJPT.4/PL.210/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Penggunaan Tanah seluas 200 m² oleh Sdr. H. Baharuddin HS dengan jangka waktu perjanjian selama 2 tahun di PP Untia;
- gg. Surat Nomor: B.1563/DJPT.4/PL.210/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Penggunaan Tanah seluas 200 m² oleh CV. Tallasa Marine dengan jangka waktu perjanjian selama 2 tahun di PP Untia;

- hh. Surat Nomor: B.1566/DJPT.4/PL.210/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Penggunaan Tanah seluas 200 m² oleh H. Haeruddin dengan jangka waktu perjanjian selama 2 tahun di PP Untia;
 - ii. Surat Nomor: B.1567/DJPT.4/PL.210/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Penggunaan Tanah seluas 200 m² oleh H. Jayadi dengan jangka waktu perjanjian selama 2 tahun di PP Untia;
 - jj. Surat Nomor: B.1565/DJPT.4/PL.210/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Penggunaan Tanah seluas 200 m² oleh H. Darwis Hak dengan jangka waktu perjanjian selama 2 tahun di PP Untia.
4. Penerapan SHTI Penerapan di 22 (dua puluh dua) UPT Pelabuhan Perikanan Pusat dan 1 SKPT Pelabuhan Perikanan, 1 (satu) Pelabuhan Perikanan Perintis 16 (enam belas) UPT Pelabuhan Perikanan Daerah. Penerbitan SHTI melalui aplikasi SHTI Online Periode 1 Januari - 31 Desember 2022:
- SHTI LA : 16.531 lembar
 - SHTI LT : 18.656 lembar
 - SHTI LTS : 2.813 lembar
- a. NOTA DINAS Nomor: 834/DJPT.4/PI.310/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Verifikasi Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) kepada Otoritas Kompeten;
 - b. NOTA DINAS Nomor: 851/DJPT.4/PI.310/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Revisi Dokumen SHTI PT. Pahala Bahari Nusantara;
 - c. NOTA DINAS Nomor: 911/DJPT.4/PI.310/XI/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Verifikasi Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) kepada Otoritas Kompeten Jerman;
 - d. Memorandum Direktur Kepelabuhanan Perikanan Nomor: 919/DJPT.4/KP.510/XI/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Usulan Delegasi RI Pada Pertemuan Regional Workshop to Exchange Information on Catch Documentation Scheme and Traceability, di Samut Prakan, Thailand.
5. *Port State Measures Agreement (PSMA)*
- a. Surat Direktur Kepelabuhanan Perikanan Nomor: B. 1574/DJPT.4/TU.330/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Undangan Pembahasan Finalisasi Modul Kurikulum Pelatihan PSM;
 - b. NOTA DINAS Nomor: 469/DJPT.4/PI.310/IV/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Laporan Hasil Pembahasan Draft Hosting Agreement dan Contribution Agreement pelaksanaan 4th Meeting of The Parties to the Port State Measures Agreement tahun 2023 di Bali;
 - c. Memorandum nomor: 948/DJPT.4/KP.510/XI/2022 tanggal 11 November 2022 Perihal Usulan Nama Delegasi Permohonan Usulan Delegasi pada the Sixth meeting of the Global Record Informal Open-Ended Technical and Advisory Working Group (GRWG6), 12 December 2022 dan Third meeting of the Agreement on Port State Measures (PSMA) Openended Technical Working Group on Information Exchange (TWG-IE3), 13-14 December 2022.
6. Tata Kelola Pelabuhan Perikanan:
- a. Telah dilaksanakan Supervisi dan evaluasi Penerapan PIPP di PPN Karangantu, PP Labuan dan PP Binuangeun Banten pada tanggal 28 September - 02 Oktober 2022;
 - b. Surat nomor: B.1651/DJPT.4/PI.340/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Username dan Password PIPP PP Merauke;
 - c. Surat nomor: B.1652/DJPT.4/PI.340/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Username dan Password PIPP PP Selat Lampa;

- d. Telah dilaksanakan Supervisi dan evaluasi Penerapan PIPP di PPP Tumumpa dan PP Kema Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 12 - 15 Oktober 2022;
 - e. Telah dilaksanakan Supervisi dan evaluasi Penerapan PIPP PPP Pulau Baai Provinsi Bengkulu pada tanggal 18 - 21 Oktober 2022;
 - f. Telah dilaksanakan Supervisi dan evaluasi Penerapan PIPP di PP Tenau dan PP Oeba prov NTT pada tanggal 19-22 Oktober 2022;
 - g. Telah dilaksanakan Supervisi dan evaluasi Penerapan PIPP di PP Morodemak Prov Jawa Tengah pada tanggal 19-22 Oktober 2022;
 - h. Telah dilaksanakan Supervisi dan evaluasi Penerapan PIPP di PP Manggar dan PPN Tanjungpandan pada tanggal 25-28 Oktober 2022;
 - i. Telah dilaksanakan Pembahasan pengembangan sistem informasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan pada hari/tanggal: Kamis s.d Sabtu / 3 s.d 5 November 2022 di Hotel Novotel Cikini Jakarta, sesuai nomor surat 1733/DJPT.4/TU.330/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022;
 - j. Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PIPP bagi Para Operator PIPP Pelabuhan Perikanan tanggal 29-30 Desember 2022 di Jakarta.
7. Kegiatan mendukung terlaksananya Jumlah Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan Kompetensinya untuk periode ini antara lain:
 - a. Surat Direktur Kepelabuhanan Perikanan Nomor B. 1571/DJPT.4/TU.330/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Undangan Rapat Teknis Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
 - b. Memorandum Direktur Kepelabuhanan Perikanan Nomor: 884/DJPT.4/KP.210/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Usulan Penempatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan;
 - c. Memorandum Direktur Kepelabuhanan Perikanan Nomor: 905/DJPT.4/HK.410/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Draft Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
 - d. Surat Direktur Kepelabuhanan Perikanan Nomor B. 1747/DJPT.4/PI.310/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penempatan Petugas Kesyahbandaran;
 - e. Surat Direktur Kepelabuhanan Perikanan Nomor B. 1756/DJPT.4/KP.510/XI/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Pelaksanaan Pelatihan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Tahun 2022;
 - f. Surat Direktur Kepelabuhanan Perikanan Nomor B. 1770/DJPT.4/PI.310/XI/2022 tanggal 3 November 2022 tentang Pelaksanaan Diklat Syahbandar di Pelabuhan Perikanan tahun 2022;
 - g. Surat Direktur Kepelabuhanan Perikanan Nomor B. 1773/DJPT.4/KP.210/XI/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Penempatan Petugas Kesyahbandaran;
 - h. Memorandum Direktur Kepelabuhanan Perikanan Nomor: 1018/DJPT.4/PI.310/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 Perihal Usulan Revisi Permen KP No.3/MEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
 - i. Memorandum Direktur Kepelabuhanan Perikanan Nomor: 1077/DJPT.4/PI.310/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 Perihal Pemenuhan SDM Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
 8. Jumlah pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar pada periode ini telah memberikan laporan sebanyak 5 (lima) Pelabuhan Perikanan yakni Pelabuhan Perikanan Sebatik, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke, Pelabuhan Perikanan Morotai dan SKPT Saumlaki Pelabuhan Perikanan Ukurlaran
 9. Kegiatan mendukung Jumlah petugas pengolah data dan verifikator PNBK pasca produksi di pelabuhan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya antara lain:

- a. Berdasarkan Memorandum Nomor: 1829/DJPT.4/RC.420/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 perihal permohonan usulan revisi DIPA untuk alokasi anggaran petugas pengolah data kegiatan PNPB Pascaproduksi serta berdasarkan surat pengesahan Daftar Isian Anggaran Petikan (DIPA) Tahun 2022 Nomor; SP DIPA-032.03.1.238720/2022 Revisi ke 05 Tanggal 06 Agustus 2022 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang sebelumnya Rp.68.755.541.000,- menjadi Rp.65.755.541.000,- semula pengadaan petugas pengolah data kegiatan PNPB Pascaproduksi berada pada Satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap, kegiatan Pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan dialihkan pada Satker Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditunjuk;
- b. Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan mekanisme PBJ untuk pengadaan jasa lainnya orang perorangan petugas pendataan produksi ikan di pelabuhan perikanan di Ruang Rapat Quaywall pada tanggal 23 Agustus 2022 sesuai nomor Surat: B. 1264/DJPT.4/TU.330/VIII/2022;

Tabel 6. Capaian IKU “Tingkat operasional pelabuhan perikanan” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Nama IKU	Target Tahun 2022	TW I	TW II	TW III	TW IV	% Capaian Target
Tingkat operasional pelabuhan perikanan	77,50	24,51	54,70	80,50	79,61	102,73

Tabel 7. Perbandingan Capaian IKU “Tingkat operasional pelabuhan perikanan” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

SS 2 Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing												
IKU 2 Tingkat operasional pelabuhan perikanan (persen)												
Realisasi 2017-2021					Realisasi 2022					Renstra DJPT		
2017	2018	2019	2020	2021	Target Tahun 2022	Target TW IV 2022	Realisasi 2022	% Realisasi thd Target 2022	% Realisasi thd Target 2022	Target Renstra 2022	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
-	-	95,85	82,93	86,27	77,50	77,50	79,61	102,73	102,73	77,50	102,73	

Tabel 8. Perhitungan Persentase Operasional Pelabuhan Perikanan Triwulan IV Tahun 2022

No	Kegiatan/Kriteria	Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot	Output			Realisasi
				Target	Realisasi	%	
1	Jumlah pelabuhan perikanan yang dibina tata kelola dan operasionalnya sesuai standar -> EVKIN	6.708.451.000	33,04%	77,50	61,48	79,33	26,21
2	Jumlah Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar --> Jumlah SKPT	5.870.000.000	28,91%	12	5	41,67	12,05
3	Jumlah syahbandar dan petugas kesyahbandaran di pelabuhan perikanan yang ditingkatkan kompetensinya	7.725.261.000	38,05%	184	200	108,70	41,36
Total		20.303.712.000	100%				79,61

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Operasional Pelabuhan Perikanan yang dibina, pada tahun 2022 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara: memaksimalkan peran serta Syahbandar dan petugas syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam melakukan sosialisasi dan Pembinaan terhadap Nelayan dan Stakeholder lainnya di lapangan;
2. Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder dari berbagai instansi terkait dalam kerangka program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
3. Peningkatan mutu hasil perikanan melalui implementasi CPIB di atas kapal dan di pelabuhan perikanan.

3.2.3 Sasaran Stratejis (SS-3): Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal

Persentase pemenuhan prasarana pemungutan PNBP pasca produksi

Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP pasca produksi dengan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan Pada Saat Didaratkan, dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan. Pelabuhan perikanan sebagai lokasi pelaksanaan PNBP pasca produksi yang melaksanakan ialah UPT dan Perintis untuk mengelola pendataan pemungutan PNBP pasca produksi dan pelabuhan perintis yang ditingkatkan fasilitasnya dalam rangka menunjang PNBP pasca produksi.

Sarana prasarana yang dibangun diharapkan mendukung secara menyeluruh pemungutan PNBP pasca produksi, serta diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap sehingga semakin maju dan berkelanjutan untuk kesejahteraan nelayan.

Pengukuran indikator ini dilakukan setiap tahun dengan target indikator ini adalah 100% pada tahun 2022. Pada Triwulan IV ini belum dilakukan perhitungan capaian. Beberapa hal yang sudah dilakukan adalah pembahasan dengan UPT Pusat maupun UPT daerah terkait kebutuhan sarana prasarana pendukung pemungutan PNBP pasca produksi antara lain:

- a. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Uji Coba Pelaksanaan Penarikan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Perikanan Swasta Bareleng Batam Provinsi Kepulauan Riau Sesuai Surat Nomor B.1093/DJPT.4/TU.330/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022;
- b. Telah dilaksanakan Kegiatan Ujicoba Pelaksanaan PNBP Pasca Produksi di PPN Ternate pada tanggal 27 - 30 Juli 2022 sesuai SPT Nomor 3315/DJPT.4/KP.440/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022;
- c. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemantauan Perkembangan Penyiapan Sarana dan Prasarana Mendukung Implementasi Penarikan PNBP Pascaproduksi pada hari / tanggal Selasa/9 Agustus 2022 melalui hybrid meeting sesuai nomor surat: B.1184/DJPT.4/TU.330/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022;
- d. Telah dihadiri Rapat Finalisasi Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Standar Operasional Prosedur Penarikan PNBP Pemanfaatan SDA Perikanan Pascaproduksi di Pelabuhan Perikanan pada tanggal 10 - 12 Agustus 2022 di PPN Kejawan;

- e. Telah dilaksanakan Audiensi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau terkait pelabuhan Pendaratan Ikan PNBP Pasca Produksi pada tanggal 26 Agustus 2022 sesuai dengan nomor surat 523/204/DKP-PT/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- f. Telah dihadiri Sosialisasi Pelaksanaan PNBP Pasca Produksi di Balai Pertemuan Nelayan PPS Belawan pada tanggal 25 Agustus 2022 sesuai nomor Surat: B 1351/PPS.BLW/TU.330/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022;
- g. Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Petunjuk Teknis dan Penyusunan Dokumen Penyediaan Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan untuk Pendataan Produksi Ikan di Pelabuhan Perikanan pada hari / tanggal Kamis-Jumat, 1-2 September 2022 di Ruang Rapat Kantor PPS Nizam Zachman, Jakarta sesuai nomor surat B. 1307/DJPT.4/TU.330/VIII/2022 pada tanggal 29 Agustus 2022;
- h. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemantauan Perkembangan Penyiapan Sarana dan Prasarana Mendukung Implementasi Penarikan PNBP Pascaproduksi pada hari/ tanggal: Selasa, 6 September 2022 secara hybrid sesuai nomor surat B.1343/DJPT.4/TU.330/IX/2022 pada tanggal 2 September 2022;
- i. Telah dilaksanakan Rapat pemantauan sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan pada tanggal 31 Oktober 2022 di RR. Quaywall lantai 11 sesuai surat nomor: B. 1743/DJPT.4/TU.330/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022;
- j. Memorandum Nomor: 1026/DJPT.4/HK.160/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 Perihal Penyampaian 2 (dua) Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Pelabuhan Pangkalan Pada Zona Penangkapan Ikan Terukur dan tentang Pelabuhan Pangkalan yang Memenuhi Syarat Penarikan PNBP Pascaproduksi;
- k. Memorandum Nomor: 1083/DJPT.4/HK.160/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 Perihal Penyampaian Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Pelabuhan Pangkalan yang Memenuhi Syarat Penarikan PNBP Pascaproduksi;

Progres pemenuhan prasarana pemungutan PNBP pasca produksi terdapat 20 (dua puluh) propinsi yang telah menyelesaikan pengadaan sarana penunjang PNBP Pascaproduksi yaitu: Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Papua Barat, Aceh, Maluku, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan.

Tabel 9. Capaian IKU “Persentase Pemenuhan Prasarana Pemungutan PNBP Pasca Produksi” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Nama IKU	Target Tahun 2022	TW I	TW II	TW III	TW IV	% Capaian Target
Persentase Pemenuhan Prasarana Pemungutan PNBP Pasca Produksi	100	-	-	-	100	100

Tabel 10. Perbandingan Capaian IKU “Persentase Pemenuhan Prasarana Pemungutan PNBP Pasca Produksi (persen)” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

SS 3	Pemenuhan Prasarana Pemungutan PNBP Perikanan Tangkap yang Optimal											
IKU 3	Persentase Pemenuhan Prasarana Pemungutan PNBP Pasca Produksi (persen)											
Realisasi 2017-2021					Realisasi 2022					Renstra DJPT		
2017	2018	2019	2020	2021	Target Tahun 2022	Target TW IV 2022	Realisasi 2022	% Realisasi thd Target 2022	% Realisasi thd Target 2022	Target Renstra 2022	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	

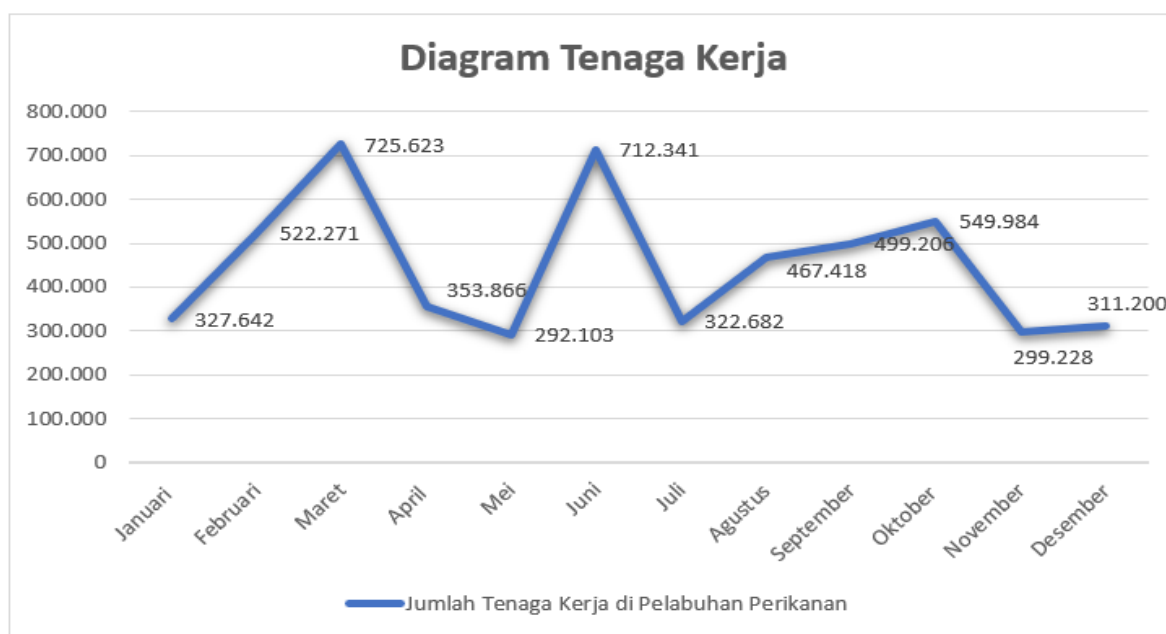
3.2.4 Sasaran Kegiatan (SK-4): Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan

Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan

Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan merupakan indikator yang menunjukkan pencapaian pengelolaan Kepelabuhanan perikanan antara lain Tenaga kerja yang terlibat langsung yaitu pelaku usaha (Nelayan dan di Pelabuhan Perikanan) yang secara langsung melaksanakan kegiatan di sektor Kelautan dan Perikanan, Tenaga kerja yang terlibat secara tidak langsung merupakan pihak lain yang tumbuh dan/atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja langsung dari kegiatan di Kawasan Pelabuhan Perikanan.

Pengukuran indikator ini dilakukan setiap 12 (dua belas) bulan atau tahunan dan target indikator ini adalah 225.531 pada tahun 2022. Pada Triwulan IV ini telah dilakukan perhitungan capaian pada bulan Desember 2022 dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sebesar 311.200 orang dengan rincian tenaga kerja yang terlibat langsung ialah Petugas Syahbandar di Pelabuhan Perikanan 113 orang, Petugas Syahbandar di Pelabuhan Perikanan 283 orang, Petugas PIPP 104 orang, Petugas CPIB 276 orang dengan total yang terlibat langsung 776 orang. Tenaga kerja yang tidak langsung anatar lain Anak Buah Kapal (ABK) dan nelayan 310.424 orang. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Indikator ini diantaranya dengan melakukan pendataan jumlah tenaga kerja di Pelabuhan perikanan bersumber dari data Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) <http://pipp.djpt.kkp.go.id> aplikasi PIPP terdapat 205 Pelabuhan Perikanan yang terdata mulai dari UPT Pusat hingga UPT Daerah dengan kelas Pelabuhan perikanan mulai dari Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Gambar 4. Diagram Tenaga Kerja yang Terlibat Pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan Triwulan Tahun 2022



Tabel 11. Capaian IKU "Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan KP (orang)" sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Nama IKU	Target Tahun 2022	TW I	TW II	TW III	TW IV	% Capaian Target
Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan KP (orang)	225.531	-	-	-	311.200	137,99

Tabel 12. Perbandingan Capaian IKU “Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan KP (orang)” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

SS 3	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan											
IKU 4	Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan KP (orang)											
Realisasi 2017-2021					Realisasi 2022					Renstra DJPT		
2017	2018	2019	2020	2021	Target Tahun 2022	Target TW IV 2022	Realisasi 2022	% Realisasi thd Target 2022	% Realisasi thd Target 2022	Target Renstra 2022	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	-	225.531	225.531	311.200	137,99	137,99	-	-	

3.2.5 Sasaran Kegiatan (SK-5): Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dilingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

A. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Indikator Kinerja pada sasaran kegiatan ini adalah Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Indeks Profesionalitas ASN meliputi dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Penilaian dimensi kualifikasi menggambarkan informasi kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Sedangkan dimensi kompetensi merupakan informasi yang menggambarkan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, mulai dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar/workshop/magang/kursus. Dimensi kinerja menilai kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP). Informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS ditunjukkan melalui dimensi disiplin. Pengolahan data diambil dari database kepegawaian SIMPEG Online KKP.

Adapun kendala yang dihadapi untuk pencapaian IKU ini salah satunya adalah terkait sisi pemutakhiran database kepegawaian. Dimana masih banyak data yang belum diperbaharui secara berkala oleh pengelola aplikasi kepegawaian Sistem Kepegawaian (SIMPEG) online KKP. Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah dari dimensi kompetensi. Dimana masih banyak pejabat struktural yang belum melaksanakan diklatpim sesuai levelnya, diklat teknis 20 Jam Pelajaran (JP) dan seminar serta untuk staf pun masih banyak yang belum melaksanakan diklat 20 JP dan mengikuti seminar. Untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, beberapa upaya telah dilakukan di antaranya dengan terus melakukan updating secara berkala, koordinasi dan bimtek updating data SIMPEG, serta mengembangkan aplikasi SIMPEG secara lebih *user friendly*. Sedangkan dari dimensi kompetensi, upaya koordinasi telah dilakukan dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP untuk merencanakan pelatihan bagi pegawai KKP, diklat pelatihan dan pendidikan bagian pegawai.

Pengukuran indikator ini dilakukan setiap setiap 6 (enam) bulan atau semesteran dengan target indikator ini adalah 79 pada tahun 2022, serta pada triwulan IV telah dilakukan perhitungan capaian dengan nilai sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian IKU “IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Nama IKU	Target Tahun 2022	TW I	TW II	TW III	TW IV	% Capaian Target
IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	79	-	73,01	-	79,30	100,38

Tabel 14. Perbandingan Capaian IKU “IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

SS 5	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan											
IKU 5	IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)											
Realisasi 2017-2021					Realisasi 2022					Renstra DJPT		
2017	2018	2019	2020	2021	Target Tahun 2022	Target TW IV 2022	Realisasi 2022	% Realisasi thd Target 2022	% Realisasi thd Target 2022	Target Renstra 2022	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
-	-	64,59	56,65	83,03	79	79	79,30	100,38	100,38	74	107,16	

Silakan ketik Nama Unit Kerja.

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DJITJEN PERIKANAN TANGKAP	99	14,37	57,48 %	33,36	83,4 %	25,2	84 %	4,96	99,2 %	77,89	SEDANG
2	DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN	53	15,4	61,6 %	38,49	96,23 %	25,75	85,83 %	5	100 %	84,64	TINGGI
3	DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	53	15,66	62,64 %	32,74	81,85 %	26,23	87,43 %	5	100 %	79,62	SEDANG
4	DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN	50	16	64 %	32,7	81,75 %	25,6	85,33 %	5	100 %	79,3	SEDANG
5	DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	64	14,69	58,76 %	38,83	97,08 %	25,31	84,37 %	5	100 %	83,83	TINGGI
6	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	72	14,39	57,56 %	39,58	98,95 %	25,07	83,57 %	4,96	99,2 %	84	TINGGI
7	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA	51	12,25	49 %	38,53	96,33 %	24,35	81,17 %	5	100 %	80,14	SEDANG
8	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	62	13,15	52,6 %	34,76	86,9 %	24,69	82,3 %	5	100 %	77,6	SEDANG
9	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	59	10,22	40,88 %	39,19	97,97 %	25,08	83,6 %	5	100 %	79,5	SEDANG
10	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	48	11,29	45,16 %	38,44	96,1 %	25,12	83,73 %	5	100 %	79,85	SEDANG
11	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	50	12,12	48,48 %	38,6	96,5 %	25,4	84,67 %	5	100 %	81,12	TINGGI
12	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	36	13,47	53,88 %	36,6	91,5 %	25,28	84,27 %	5	100 %	80,35	SEDANG
13	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	42	10,48	41,92 %	39,64	99,1 %	25	83,33 %	5	100 %	80,12	SEDANG
14	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU	52	12,06	48,24 %	39,42	96,55 %	23,17	77,23 %	5	100 %	79,65	SEDANG
15	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	34	11,91	47,64 %	39,56	96,9 %	25	83,33 %	5	100 %	81,47	TINGGI

Gambar 5. Dashboard IP ASN sampai dengan bulan Desember tahun 2022

Kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan IV dalam mendukung indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini adalah Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan antara lain:

- Memorandum Direktur Kepelabuhanan Perikanan nomor: 856/DJPT.4/TU.140/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Laporan hasil evaluasi elektronik Sasaran Kinerja Pegawai (e-SKP) lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan di Bulan September 2022;
- Direktorat Kepelabuhanan Perikanan menghadiri undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: B.5185/DJPT.1/TU.330/XI/2022 Tanggal 28 November 2022 perihal

Undangan Monitoring dan Evaluasi Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Hasil berikut kegiatan yang dilakukan monitoring:

- Pengisian SKP BKN;
 - Kamajuan Studi Ibel;
 - Kinerja P3K;
 - Matriks TNA Tahun 2022;
 - Data TKK untuk Tahun 2023;
 - Usulan UDPI dan SKLS DJPT;
 - Rencana Tubel Ibel 2023;
 - Dokumen ZI;
 - Formulir Asli LHKPN KPK dan Daftar Pengelolaan Keuangan Tahun 2023;
 - Evaluasi Kelengkapan Berkas Pegawai Pada Aplikasi Epegawai;
 - Evaluasi Jabatan Fungsional;
 - Evaluasi Presensi Pegawai;
 - Daftar IP ASN;
 - Daftar Data Evaluasi dan Rencana Mutilasi Pegawai;
 - Daftar Nama Pegawai yang akan Pensiun 2023-2024;
 - Daftar Nama Pegawai yang Tidak Memiliki Kartu;
 - Daftar Nama Rencana Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dari Jabatan Fungsional;
 - Daftar Nama Rencana Kenaikan Pangkat Kenaikan Jabatan;
 - Daftar Rekapitulasi Hukuman Disiplin dan Kode Etik;
 - Daftar Gaji Pegawai tahun 2022;
 - Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Tahun 2022.
- c. Dalam rangka peningkatan SDM Persuratan dan Kearsipan di lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) dan Pelabuhan Perikanan Perintis Direktorat Kepelabuhanan Perikanan melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan sesuai surat undangan B.1493/DJPT.4/TU.330/IX/2022 tanggal 27 September 2022 yang dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta pada tanggal 4 s/d 6 Oktober 2022 dengan materi kegiatan:
- Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
 - Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - Teknis Pembuatan Tata Naskah Dinas lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, SKPT dan PP Perintis;
 - Pengelolaan Arsip Dinamis;
 - Teknis Pemberkasan Arsip Aktif;
 - Praktek Tata Kelola Arsip di Record Center DJPT Muara Baru;
 - Evaluasi Teknis Pengelolaan Kearsipan dan Tata Naskah Dinas.
- d. Memorandum Direktur Kepelabuhanan Perikanan nomor: 1012/DJPT.4/TU.140/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 perihal permohonan atas surat keterangan pegawai dalam kondisi sakit;
- e. Memorandum Direktur Kepelabuhanan Perikanan nomor: 1082/DJPT.4/KP.420/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 perihal Kenaikan Pangkat Pegawai Dit. Kepegawaian Perikanan April 2023.

B. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan.

Rekonsiliasi kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan dari rekonsiliasi kinerja adalah untuk meningkatkan aspek pelaporan kinerja SAKIP, meningkatkan konsistensi penerapan sistem manajemen kinerja pada SAKIP dan memberikan umpan balik pada perbaikan proses perencanaan kinerja.

- a. Output yang dinilai dalam rekonsiliasi kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan yaitu
 - Nilai aspek kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian dan ketepatan masing-masing unit kerja;
 - Kertas kerja hasil rekonsiliasi oleh pembahas dan unit yang direkon, dan;
 - Rekomendasi dari hasil rekon yang akan disampaikan kepada unit kerja untuk ditindaklanjuti.
- b. Dokumen yang dinilai dalam rekonsiliasi kinerja:
 - Perjanjian Kinerja (PK)
 - Manual IKU
 - Rincian Target IKU
 - Rencana Aksi (Renaksi)
 - Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan I, II, dan III
 - Dokumen data Dukung Lkj Triwulan III
- c. Nilai diperoleh dari hasil rekonsiliasi kinerja setiap tahunnya, terhadap 5 (lima) komponen SAKIP (kinerja) di Dit. Kelabuhanan Perikanan, yaitu:
 - Perencanaan Kinerja;
 - Pengukuran Kinerja;
 - Pelaporan Kinerja;
 - Evaluasi Kinerja, dan;
 - Pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Pada tingkat eselon II KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh secara internal lingkup eselon I. Target indikator nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan pada 2022 adalah 92%. Realisasi indikator kinerja ini pada triwulan IV Tahun 2022 telah dilakukan perhitungan terdapat beberapa aspek yang dinilai antara lain:

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA 2022

NAMA UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap							
NAMA UNIT YBS	Direktorat Kelabuhanan Perikanan							
USER KINERJAKU	0304000000							
TANGGAL REKON	Tuesday, November 29, 2022							

ASPEK KETAPUHAN	PK	Manuat IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ
	1,00	1,00	1,00	1,00	Tw I	Tw II	Tw III	Tw III*
Skor	100,00							
Catatan	-							

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET		REALISASI	
	PK - Manuat IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerja	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerja	LKJ/LCK Tw III - Kinerja	LKJ/LCK Tw III - Kinerja
Skor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Catatan	100,00							

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2022		
	Tw I	Tw II	Tw III
Skor	119,38	113,28	118,06
Catatan	116,91		

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atas
Skor	100,00	100,00
Catatan	100,00	

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KETAPUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per aspek	100,00	100,00	116,91	100,00
Skor dikali Bobot	25,00	25,00	29,23	20,00
Total Skor	99,23			

SKALA	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atas
Skor	100,00	100,00
Catatan	100,00	

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KETAPUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per aspek	100,00	100,00	116,91	100,00
Skor dikali Bobot	25,00	25,00	29,23	20,00
Total Skor	99,23			

CATATAN:

- Pada tahun 2022, Direktorat Kelabuhanan Perikanan terdapat 10 Indikator Kinerja, terdiri dari 4 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 4 Indikator Triwulanan
- Aspek Kepatuhan, Kesesuaian, dan Ketepatan telah selaras dan mendapatkan nilai 100.

Pembahas

(Ikhsan Zuhry)

(Pulung Adhi Prabowo)

Unit yang di Sampling

(Adrian Septendi)

(Adit Mulya Pratama)

(Q. Muhammad Royhan)

Gambar 6. Lembar Kerja Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan

Tabel 15. Capaian IKU “Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan (nilai)” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Nama IKU	Target Tahun 2022	TW I	TW II	TW III	TW IV	% Capaian Target
Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan (nilai)	92	-	-	-	99,23	107,86

Tabel 16. Perbandingan Capaian IKU “Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan (nilai)” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

SS 5	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan lingkungan Direktorat Kelabuhanan Perikanan											
IKU 6	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan (nilai)											
Realisasi 2017-2021					Realisasi 2022					Renstra DJPT		
2017	2018	2019	2020	TW IV 2021	Target Tahun 2022	Target TW IV 2022	Realisasi 2022	% Realisasi thd Target 2022	% Realisasi thd Target 2022	Target Renstra 2022	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	94,16	96,69	92	92	99,23	107,86	107,86	85,25	116,40	

C. Persentase Unit Kerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui

dan dipelajari. Perhitungan indikator ini berasal dari rata-rata persentase unit kerja level 2-4 yang tergabung dan mendistribusikan informasi dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih (*aplikasi Bitrix24*).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian IKU dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi, sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data. Pada tahun 2022 dalam pengisian bitrix24 terdapat sedikit perubahan yaitu : membuat status minimal 6 kali atau 1 video/*campaign* dengan tema kelautan dan perikanan atau share 3 karya tulis/jurnal atau hasil penelitian.

Tabel 17. Capaian IKU “Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Nama IKU	Target Tahun 2022	TW I	TW II	TW III	TW IV	% Capaian Target
Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar	86	100	100	100	100	116,28

Tabel 18. Perbandingan Capaian IKU “Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

SS 5	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan											
IKU 7	Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)											
Realisasi 2017-2021					Realisasi 2022					Renstra DJPT		
2017	2018	2019	2020	2021	Target Tahun 2022	Target TW IV 2022	Realisasi 2022	% Realisasi thd Target 2022	% Realisasi thd Target 2022	Target Renstra 2022	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
-	73,21	81,02	100	100	86	86	100	116,28	116,28	86	116,28	



Tri Aris Wibowo > To all employees

December 19 10:14 am

Telah dilaksanakan Kunjungan Kerja ke Jepang pada tanggal 13 - 17 Desember 2022

Dalam rangka Penguatan kerja sama Indonesia dengan Jepang khususnya dalam Pembangunan Pelabuhan Perikanan dan investasi Kelautan dan Perikanan di Indonesia berikut Agenda pertemuan di Jepang :

pada tanggal 14 Desember 2022 pertemuan dengan JICA membahas perkembangan PHLN IFP - IFM Phase I dan Hibah SKPT pada tanggal 15 Desember 2022 Pertemuan Informal dengan Dubes RI untuk Jepang, Bapak Heri Akhmadi, membahas peluang peningkatan kerjasama RI dengan Jepang Khususnya di Bidang pengembangan pelabuhan perikanan dan pasar ikan pada tanggal 16 Desember 2022 Pertemuan dengan perwakilan pemerintah Kota Miura dan mengunjungi lokasi calon pengembangan pelabuhan perikanan terintegrasi wisata, kerjasama antara pemerintah kota Miura dengan Mitsubishi Corp, serta mengunjungi Pelabuhan Perikanan Misaki



Gambar 7. Aplikasi Bitrix (Kunjungan Kerja ke Jepang)

Pada Triwulan IV Tahun 2022, realisasi IKU Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar telah mencapai 116,28 % terhadap target triwulan IV. Hal ini dikarenakan semua pegawai yang seharusnya mengisi (Direktur, Koordinator dan Subkoordinator) telah berpartisipasi aktif dalam penggunaan teknologi ini. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar mencakup tiga komponen yaitu :

1. Kepatuhan dalam menyampaikan dokumen (Renstra, Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Laporan Kinerja, dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi);
2. Keikutsertaan : pimpinan unit kerja dimulai dari level II sampai dengan staf pelaksana (minimal 2 orang staf pelaksana per level IV);
3. Keaktifan : pimpinan unit kerja dimulai dari level II sampai dengan Level IV sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Kepelabuhanan Perikanan berdasarkan LHP (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 untuk Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menjadi objek pengawasan. Pada Triwulan IV Tahun 2022 capaian Indikator Kinerja ini sebesar 100% atau tidak ada temuan. Capaian dinyatakan 100% jika tidak ada rekomendasi hasil pengawasan yang perlu ditindaklanjuti atau dilengkapi dan disampaikan atau jika rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti, pada triwulan IV tahun 2022 tidak terdapat rekomendasi hasil pengawasan pada Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang dokumennya perlu ditindaklanjuti, dilengkapi dan disampaikan.

Tabel 19. Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Nama IKU	Target Tahun 2022	TW I	TW II	TW III	TW IV	% Capaian Target
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	70	100	100	100	100	142,86

Tabel 20. Perbandingan Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

SS 5	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan											
IKU 8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)											
Realisasi 2017-2021					Realisasi 2022					Renstra DJPT		
2017	2018	2019	2020	2021	Target Tahun 2022	Target TW IV 2022	Realisasi 2022	% Realisasi thd Target 2022	% Realisasi thd Target 2022	Target Renstra 2022	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	100	100	70	70	100	142,86	142,86	70	142,86	

Kendala yang dihadapi untuk pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi pada tahun sebelumnya adalah keterlambatan penyampaian laporan tindak lanjut sehingga akan diperhitungkan sebagai pencapaian pada periode triwulan selanjutnya. Rekomendasi yang terbit dan tindak lanjut yang cepat dan tepat merupakan bentuk pengendalian yang diimplementasikan dengan tepat demi kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan sepanjang triwulan IV tahun 2022 yang berkontribusi terhadap pencapaian IKU ini adalah koordinasi rutin internal Direktorat Kepelabuhanan Perikanan serta lingkup Ditjen Perikanan tangkap melalui memo resmi, dan koordinasi dengan Itjen.

E. Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis

Indikator ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator ini pengukuran dilakukan oleh Itjen KKP pada Triwulan IV atau akhir tahun anggaran 2022.

Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis diukur berdasarkan:

1. Tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup DJPT. Tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.
2. Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
 - b. Memiliki anggaran besar;
 - c. Mendukung secara langsung target kinerja KKP;
 - d. Mendukung capaian proritas nasional;
 - e. Merupakan arahan direktif Presiden, dan
 - f. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Indikator ini dalam rangka melaksanakan kegiatan prioritas atau strategis lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menilai pemanfaatan, permasalahan dan memberikan rekomendasi dari kegiatan prioritas, khususnya kegiatan Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada masyarakat melalui Tugas Pembantuan Provinsi. Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan bantuan

pemerintah merupakan salah satu indikator kinerja Kepelabuhanan Perikan sebagai suatu ukuran efektivitas pemanfaatan kegiatan Prasarana Perikanan Tangkap. Beberapa aspek penilaian meliputi: pencapaian tujuan (PT), integrasi (IG), adaptasi (AT), evaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1), penilaian efektivitas kegiatan Tugas Pembantuan Provinsi pelaksanaan kegiatan prioritas TA 2022. Target indikator nilai Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada 2022 adalah 75%. Penilaian efektivitas dilakukan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 adalah pada kegiatan prioritas nasional dengan realisasi indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 21. Kegiatan Prioritas/Strategis Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

No	Nama Pelabuhan Perikanan	Pekerjaan
1	PPN Merauke	<p>Pekerjaan berupa pembangunan ducting di PPN Merauke. Pekerjaan dilaksanakan mulai tanggal 29 September 2021 selama 30 hari kalender dengan konsultan CV. Gerbang Timur Papua. Harga kontrak termasuk ppn sebesar Rp. 40.130.200. Pekerjaan selesai pada tanggal 28 Oktober 2021 dan langsung dilakukan serah terima pekerjaan. Harga kontrak termasuk ppn sebesar Rp. 40.130.200. Pekerjaan selesai pada tanggal 28 Oktober 2021 dan langsung dilakukan serah terima pekerjaan.</p> <p>1)Pekerjaan persiapan, bongkaran, plesteran, dan acian, terdiri dari pemindahan dan pemasangan outdoor AC di tempat baru dan aksesoris (dudukan, braket, pipa); bongkar dinding, plesteran 1PC:4PP tebal 15 mm (openingan), acian dinding (openingan);</p> <p>2)Pekerjaan ducting, terdiri dari pekerjaan besi (siku 40x40x4mm, penutup ducting plat BJLS 0,30 perkuatan paku rivert dan sealant, besi siku 50x50x5mm, pengelasan rangka ducting siku 40x40x4mm, baut perkuatan M12, dynabolt M12-10cm).</p>
2	PP Teluk Awang	<p>Pekerjaan konstruksi berupa pengembangan dan pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan Teluk Awang. Harga kontrak termasuk ppn sebesar Rp. 310.057.000 dengan pelaksanaan pekerjaan selama 82 hari kalender. Telah dilakukan addendum tanggal 4 November 2021 dengan nilai addendum sebesar Rp. 314.062.000 dan pekerjaan mulai dilakukan tanggal 7 Oktober 2021.</p> <p>Ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan berupa:</p> <p>1) Pekerjaan persiapan, terdiri dari pembersihan lahan, pemasangan papan nama proyek, pembuatan gudang dan direksiket, bongkaran bangunan eksisting, mobilisasi dan demobilisasi, administrasi dokumentasi dan laporan, SMK3;</p> <p>2) Pekerjaan atap dan plafon, terdiri dari pekerjaan rangka atap baja canai dingin dengan baja ringan C70.70, penutup atap, nok/bubungan atap, plafon gypsum penutup langit;</p> <p>3) Pekerjaan struktur, perbaikan dinding dan kolom, waterproofing dak beton, pondasi tangga air, kolom pedestal KP Uk. 30x30 cm, balok bawah, kolom K1 Uk. 30x30 cm, balok tengah, balok atas, plat lantai (dudukan tangga air), tangga besi tinggi 3,5 m dengan besi hollow 40,40x1,2 ,m;</p> <p>4)Pekerjaan arsitekturan dan pelengkap, pemasangan kusen pintu dan jendela, pengecatan, penutup lantai, door closer;</p> <p>5) Pekerjaan mekanikal dan elektrikal, pemasangan sambungan listrik baru daya 2.200 watt, pemasangan box MCB, instalasi titik penerangan, pemasangan (lampu, saklar tunggal, saklar ganda), instalasi dan pemasangan stop kontak, pengadaan dan pemasangan tangga air kapasitas 1.000 liter bahan PE, pelampuk automatic pada tangga; dan</p> <p>6) Pekerjaan plambing dan sanitasi, terdiri dari pekerjaan jaringan pipa, pemasangan (toilet duduk, shower, wastafel, floor drain, pompa, septitank biofil kapasitas 2 m3, kran air diameter ½”, meteran air), pembuatan (bak kontrol, sumur resapan, meteran air).</p>

Target Indikator Kinerja Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (2338) pada kegiatan prioritas nasional dilakukan secara tahunan, dimana Tahun 2022 merupakan hasil penghitungan capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis

Direktorat Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (Persen) pada tahun 2021, yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan PPN Merauke dengan alamat Jalan Noterdam- Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Tahun 2021 memperoleh nilai 100% dan telah dilakukan BAST, serta melaporkan pemanfaatan ducting di PPN Merauke;
2. Pemanfaatan PP Teluk Awang dengan alamat Jalan Pelabuhan, no. 1, Dusun Awang, Desaa Mertak, Kec Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat berupa pekerjaan pengembangan dan pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan Tahun 2021 memperoleh nilai 100% dan telah dilakukan BAST, serta melaporkan pemanfaatan.
3. Pencapaian Tujuan.

Pencapaian Tujuan diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya. Pada komponen penilaian disini pencapaian nya dilihat dari capaian anggaran dan pelaksanaan dengan Bobot 80%. yang dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Capaian Anggaran dan Pelaksanaan	Target Tahun 2021	Capaian	%
1	Pekerjaan konstruksi berupa pengembangan dan pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan Teluk Awang	99	99,00	100,00%
2	Pekerjaan pembangunan ducting di PPN Merauke	99	99,00	100,00%
	Total	99	99	100,00%

4. Integrasi.

Integrasi diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/obyek kegiatan. Hasil penghitungan dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Integrasi	Target Tahun 2021	Capaian	%
1	Pekerjaan konstruksi berupa pengembangan dan pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan Teluk Awang	1	1	100,00%
2	Pekerjaan pembangunan ducting di PPN Merauke	1	1	100,00%
	Total	2	2	100,00%

5. Adaptasi.

No	Adaptasi	Target Tahun 2021	Capaian	%
1	Pekerjaan konstruksi berupa pengembangan dan pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan Teluk Awang	1	1	100,00%
2	Pekerjaan pembangunan ducting di PPN Merauke	1	1	100,00%
	Total	2	2	100,00%

Adaptasi diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan obyek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan. Berdasarkan perhitungan ke 3 (tiga) komponen penilaian Indikator Kinerja Tingkat efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen), dapat disimpulkan bahwa target yang dicapai oleh ketiga pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan melalui Anggaran TA 2021 telah melebihi target yang ditetapkan sebelumnya yakni sebesar 100 atau 126,10% dari terगत Indikator Kinerja sebesar 75%.

No	Komponen Penilaian	Capaian	Bobot	%
1	Capaian Anggaran dan Pelaksanaan	100,00%	80	80,00
2	Integrasi	100,00%	10	10,00
3	Adaptasi	100,00%	10	10,00
Total				100,00

Tabel 22. Capaian IKU “Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis (persen)” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Nama IKU	Target Tahun 2022	TW I	TW II	TW III	TW IV	% Capaian Target
Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis (persen)	75	-	-	-	100	133,33

Tabel 23. Perbandingan Capaian IKU “Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis (persen)” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

SS 5	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan											
IKU 9	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis (persen)											
Realisasi TW III 2017-2021					Realisasi 2022					Renstra DJPT		
2017	2018	2019	2020	2021	Target Tahun 2022	Target TW IV 2022	Realisasi 2022	% Realisasi thd Target 2022	% Realisasi thd Target 2022	Target Renstra 2022	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	-	75	75	100	133,33	133,33	-	-	

F. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Persentase penyerapan Anggaran adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan Kementerian/Lembaga. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan. Target indikator nilai Persentase penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada 2022 adalah 40% untuk semester 1 dan 95% untuk semester 2. Realisasi sampai dengan akhir bulan Desember 2022 ini atau pada triwulan IV Tahun 2022 dapat diperoleh dengan nilai 98,80%.

Alokasi anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun 2022 telah dilakukan Revisi sebanyak 5 (lima) revisi Anggaran 2022. Berdasarkan Aplikasi Sakti pada bulan Januari 2022 dengan Pagu Awal Rp.68.755.541.000. Pada bulan Maret 2022 Pagu Revisi I Blokir Automatic Adjustment (AA) menjadi Rp.59.540.596.000 serta pada akhir bulan Juni 2022 Revisi II Blokir Automatic Adjustment (AA) sebesar Rp.44.740.596.000. Pada tanggal 06 Juni 2022 terdapat Revisi III Blokir Automatic Adjustment (AA) sebesar Rp.44.138.622.000. Pada tanggal 01 Juli 2022 terdapat Revisi IV Blokir Automatic Adjustment (AA) sebesar Rp.41.417.199.000. Pada tanggal 6 Agustus 2022 terdapat Revisi V Blokir Automatic Adjustment (AA) sebesar Rp. 44.369.864.000. Pada tanggal 26 Oktober 2022 terdapat Revisi VI Blokir Automatic Adjustment (AA) sebesar Rp. 73.914.128.000. Pada tanggal 01 November 2022 terdapat Revisi VII Blokir Automatic Adjustment (AA) sebesar Rp. 73.914.128.000. Pada tanggal 14 November 2022 terdapat Revisi VIII Blokir Automatic Adjustment (AA) sebesar Rp. 73.914.128.000. Pada tanggal 02 Desember 2022 terdapat Revisi IX Blokir Automatic Adjustment (AA) sebesar Rp. 53.204.128.000. Pada tanggal 08 Desember 2022 terdapat Revisi X Blokir Automatic Adjustment (AA) sebesar Rp. 51.639.128.000. Pada tanggal 23 Desember 2022 terdapat Revisi XI Blokir Automatic Adjustment (AA) sebesar Rp. 51.639.128.000 dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 24. Revisi Anggaran (Blokir Automatic Adjustment) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Uraian	Jumlah
DIPA Awal	68.755.541.000
Revisi 1 (AA)	59.540.596.000
Revisi 2 (AA)	44.740.596.000
Revisi 3 (AA)	44.138.622.000
Revisi 4 (AA)	41.417.199.000
Revisi 5 (AA)	44.369.864.000
Revisi 6 (AA)	73.914.128.000
Revisi 7 (AA)	73.914.128.000
Revisi 8 (AA)	73.914.128.000
Revisi 9 (AA)	53.204.128.000
Revisi 10 (AA)	51.639.128.000
Revisi 11 (AA)	51.639.128.000

Realisasi anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2022 berdasarkan aplikasi <http://sakti.kemenkeu.go.id> sebesar Rp.47.755.112.527,- dengan Pagu Revisi 48.334.183.000 atau baru mencapai 98,80%. Adapun realisasi berdasarkan pengelompokan anggaran adalah sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 25. Alokasi dan Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2022

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	
	(Rp)	(Rp)	%
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	48.334.183.000	47.755.112.527	98,80
PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	7.725.261.000	7.527.314.383	97,44
BGA Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	7.535.620.000	7.458.004.862	98,97
CBQ Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	2.600.295.000	2.504.839.527	96,33
QGA Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	5.800.000.000	5.735.173.481	98,88
RBQ Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	20.187.806.000	20.053.508.647	99,33
SCC Petugas pengolah data dan verifikator pemungutan PNBP perikanan tangkap di pelabuhan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	4.485.201.000	4.476.271.627	99,80

Tabel 26. Capaian IKU “Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Nama IKU	Target Tahun 2022	TW I	TW II	TW III	TW IV	% Capaian Target
Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	95	-	24,07	-	98,80	104,00

Tabel 27. Perbandingan Capaian IKU “Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kelabuhanan Perikanan (Persen)” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

SS 5	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan lingkungan Direktorat Kelabuhanan Perikanan											
IKU 10	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kelabuhanan Perikanan (Persen)											
Realisasi TW III 2017-2021					Realisasi 2022					Renstra DJPT		
2017	2018	2019	2020	2021	Target Tahun 2022	Target TW IV 2022	Realisasi 2022	% Realisasi thd Target	% Realisasi thd Target 2022	Target Renstra 2022	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	-	95	95	98,80	104,00	104,00	-	-	

Tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai realisasi anggaran Direktorat Kelabuhanan Perikanan pada Triwulan IV Tahun 2022 sudah diatas target Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase penyerapan anggaran Direktorat Kelabuhanan Perikanan 95% capaian realisasi pada Triwulan IV telah mencapai 98,80%, hal ini di dukung pada Triwulan III tahun 2022 kegiatan-kegiatan yang dilakukan lebih fokus pada tahap koordinasi, perencanaan dan persiapan lelang pengadaan barang dan jasa. Pada aplikasi <http://sakti.kemenkeu.go.id> terakhir pengajuan karwas kontrak terlalu dekat dengan akhir tahun jika ada permasalahan seperti nomor rekening tidak sesuai dengan resume kontrak dan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Akuntansi Negara (OMSPAN) jika tidak langsung ditindaklanjuti dapat menyebabkan penyampaian data kontrak melewati batas waktu yang ditentukan oleh KPPN. Rekomendasi atau tindaklanjut perlu dilakukan percepatan maksimal dari berbagai kegiatan yang ada pada Direktorat Kelabuhanan Perikanan agar capaian kinerja serta realisasi anggaran dapat dicapai maksimal serta tidak dikerjakan pada akhir tahun mengakibatkan penumpukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada akhir tahun.

BAB 4. PENUTUP

Direktorat Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu unit eselon II di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Kelautan dan Perikanan berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Rencana strategis KKP, Rencana strategis DJPT, dan perjanjian kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Direktur Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama 1 tahun anggaran. Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya dengan tahun 2022 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan. Beberapa indikator baru dan cara perhitungan yang berbeda di tahun 2022, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

IKU Direktorat Kelautan dan Perikanan telah memenuhi target pada triwulan IV atau akhir tahun 2022, IKU tersebut pengukurannya bersifat triwulanan, semesteran atau tahunan pada akhir tahun. Oleh karena itu, pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi fokus utama dalam melaksanakan kegiatan pada triwulan IV.

Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Kelautan dan Perikanan, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun selanjutnya. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Melakukan percepatan menyelesaikan kegiatan-kegiatan pendukung IKU agar dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya. Tindaklanjutnya melaksanakan rapat koordinasi terkait percepatan penyelesaian kegiatan pendukung IKU lingkup Direktorat Kelautan dan Perikanan;
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pada sebelum berakhir triwulan III sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak menumpuk pada akhir tahun. Tindaklanjutnya membuat jadwal perencanaan kegiatan untuk triwulan, semester;
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pencapaiannya pada akhir tahun, agar dapat direalisasikan pada akhir sebelum triwulan IV. Tindaklanjutnya konsisten terhadap jadwal pelaksanaan yang telah dibuat.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Direktorat Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 ini dapat menjadi menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Direktur Kelautan dan Perikanan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.